



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

BAB I DASAR HUKUM

1.1. Informasi Umum

Pengelolaan pemerintahan yang baik (good government) mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Samarinda harus menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Untuk hal tersebut seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2021 ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Sistem & Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Sistem & Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.
20. Peraturan Walikota Samarinda No.59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
21. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



BAB II

KONDISI OPD

Bahwa pada masa reformasi dan keterbukaan dewasa ini, Instansi Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, serius dan dapat menjelaskan secara rinci dan detail segenap kebijakan dan kegiatannya kepada publik sebagai akuntabilitas yang seharusnya dilakukan. Karenanya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021. Adapun Program dan Kegiatan yang memberi arah segenap aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan aktivitas pelayanan bagi masyarakat Kota Samarinda.

Pada Laporan Keuangan Tahun 2021 Kota Samarinda, memiliki 8 (delapan) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Program Perlindungan Perempuan.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
6. Program Perlindungan Khusus Anak.
7. Program Administrasi Pemerintah Desa.
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Untuk melaksanakan Program diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai 28 (Dua puluh delapan) kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kend.Dinas.
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.



11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD.
13. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.
15. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak.
16. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana layanan bagi Perempuan korban kekerasan.
17. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
18. Penyediaan Data Gender dan Anak.
19. Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
20. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
21. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
22. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.
23. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG.
24. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (PKK).
25. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.
26. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan.
27. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. (DAK).
28. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi perempuan korban kekerasan. (DAK).

2.1 Kebijakan Keuangan

Sumber pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah (APBD) Kota Samarinda Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 10.583.893.110,00,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) untuk keperluan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 5.861.595.910,00 (Lima



Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan ratus Sepuluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Kinerja Anggaran (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.659.699.610,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.819.466.300,00
3.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	375.230.000,00
4.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.200.000,00
	Jumlah	5.861.595.910,00

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 4.722.297.200,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Kinerja Anggaran (RP)
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Bahan Pakai Habis	951.580.300,00
	Belanja Jasa Kantor	1.720.093.300,00
	Belanja Premi Asuransi	33.761.200,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	600.000,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.232.100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	952.381.000,00
	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	58.000.000,00
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.974.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin :	
	Belanja Modal Pompa	6.995.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Berroda Dua	31.562.000,00
	Belanja Modal Alat kantor Mesin Hitung	1.050.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	108.030.300,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Pejabat	138.500.000,00



	Belanja Modal Alat Studio	62.500.000,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.600.000,00
	Belanja Modal Personal Komputer	332.500.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	157.538.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olah Raga/Peralatan Permainan	50.000.000,00
	Belanja Modal Tanda Penghargaan	2.400.000,00
	J U M L A H	4.722.297.200,00

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021 dengan rincian pelaksanaan program/kegiatan dan anggarannya adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.	98.310.000,00
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.479.165.910,00
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	648.563.000,00
4.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.400.000,00
5.	Belanja Jasa pemeliharaan, Pajak Kendaraan dan BBM	25.200.000,00
6.	Penyediaan Jasa Rehabilitasi Gedung dan Alat Pembersih	25.000.000,00
7.	Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Kantor	4.337.000,00
8.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik	2.500.000,00
9.	Penyediaan Bahan Logistik ATK	7.500.000,00



10.	Penyediaan Barang Cetak, Penggandaan dan Surat Kabar	15.000.000,00
11.	Penyediaan Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00
12.	Penyediaan Belanja Peralatan dan Perlengkapan	10.000.000,00
II.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :	
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	159.710.000,00
III.	Program Perlindungan Anak :	
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan.	1.147.972.000,00
2.	Kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan.	75.000.000,00
3.	Kegiatan Penyediaan kebutuhan Spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	245.710.000,00
4.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan (DAK).	403.206.000,00
5.	Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan.(DAK)	81.625.000,00
IV	Program Peningkatan Kualitas Keluarga :	
1.	Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.	148.710.000,00
2.	Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak	69.260.000,00
V	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) :	
1.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.	117.060.000,00
2.	Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.	82.260.000,00
3.	Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.	91.217.200,00



VI	Program Perlindungan Khusus Anak :	
1.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.	117.471.000,00
2.	Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus.	72.316.000,00
VII	Program Administrasi Pemerintahan Desa:	
1.	Kegiatan fasilitasi Penyusunan Profil Desa	100.000.000,00
VIII.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat :	
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat.	1.048.800.000,00
2.	Kegiatan fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	147.600.000,00
	Jumlah	10.583.893.110,00

**BAB III****PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 10.583.893.110,00 (Sepuluh Milyar Lima ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri dari :

1. **Belanja Tidak Langsung** adalah sebesar Rp. 5.861.595.910,00 (Lima Milyar Delapan ratus Enam Puluh Satu Juta Lima ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan ratus Sepuluh Rupiah) realisasi sebesar Rp.5.518.524.883,00 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) rincian realisasi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Capaian Keuangan (%)	Prosentase Capaian Fisik (%)
1	Gaji dan Tunjangan	2.659.699.610,00	2.590.334.012,00	97%	100%
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.819.466.300,00	2.636.910.871,00	94%	100%
3	Honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	375.230.000,00	291.280.000,00	78%	100%
4	Honor Pengadaan Barang/Jasa	7.200.000,00	,00	0%	0%
	Jumlah	5.861.595.910,00	5.518.524.883,00	94%	100%

2. **Belanja Langsung** adalah sebesar Rp. 4.722.297.200,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 3.955.730.251,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dengan uraian realisasi sebagai berikut :



No.	Uraian	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Capaian Keuangan (%)	Prosentase Capaian Fisik (%)
1.	Belanja Barang dan Jasa	3.827.621.900.00	3.110.041.906.00	81%	100%
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	892.275.300.00	844.788.345.00	95%	100%
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.400.000.00	900.000.00	38%	100%
	Jumlah	4.722.297.200.00	3.955.730.251.00	84%	100%

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021 dengan rincian pelaksanaan program/kegiatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PROSENTASE CAPAIAN KEUANGAN (%)	PROSENTASE CAPAIAN FISIK (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.	98.310.000,00	73.070.200,00	74%	100%
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.479.165.910,00	5.227.244.883,00	97%	100%
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	648.563.000,00	635.926.944,00	98%	100%
4.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.400.000,00	1.084.793,00	1%	100%
5.	Belanja Jasa pemeliharaan, Pajak Kendaraan dan BBM	25.200.000,00	21.302.355,00	85%	100%

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021



6.	Penyediaan Jasa Rehabilitasi Gedung dan Alat Pembersih.	25.000.000,00	25.000.000,00	100%	100%
7.	Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana kantor.	4.337.000,00	4.330.000,00	100%	100%
8.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	100%
9.	Penyediaan Bahan Logistik ATK	7.500.000,00	7.500.000,00	100%	100%
10	Penyediaan Barang Cetak, penggandaan dan Surat Kabar	15.000.000,00	15.000.000,00	100%	100%
11	Penyediaan Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	74.927.697,00	100%	100%
12	Penyediaan Belanja Peralatan dan Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	100%
II	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :				
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	159.710.000,00	140.241.847,00	88%	100%
III	Program Perlindungan Anak :				
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan.	1.147.972.000,00	1.075.350.157,00	94%	100%
2.	Kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan.	75.000.000,00	67.949.800,00	91%	100%
3.	Kegiatan Penyediaan kebutuhan Spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	245.710.000,00	212.939.033,00	87%	100%
4.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan.(DAK)	403.206.000,00	-	0%	0%
5.	Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi perempuan Korban Kekerasan. (DAK)	81.625.000,00	53.311.000,00	15%	14%



IV	Program Peningkatan Kualitas Keluarga :				
1.	Kegiatan Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.	148.710.000,00	138.573.600,00	93%	100%
2.	Kegiatan Penyediaan data Gender dan Anak	69.260.000,00	52.604.000,00	76%	100%
V.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) :				
1.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.	117.060.000,00	109.245.060,00	93%	100%
2.	Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.	82.260.000,00	75.124.860,00	91%	100%
3.	Kegiatan Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.	91.217.200,00	84.045.080,00	92%	100%
VI	Program Perlindungan Khusus Anak :				
1.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak.	117.471.000,00	69.745.221,00	59%	100%
2.	Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus.	72.316.000,00	61.356.000,00	85%	100%
VII	Program Administrasi Pemerintahan Desa:				
1.	Kegiatan fasilitasi Penyusunan Profil Desa	100.000.000,00	90.307.059,00		100%



VIII	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat :				
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat.	1,048.800.000,00	1.027.538.345,00	98%	100%
2.	Kegiatan fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	147.600.000,00	118.037.200,00	80%	100%
	JUMLAH	10.583.893.110,00	9.474.255.134,00	90%	100%



BAB IV
IKHTISAR KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran dan Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
	BELANJA DAERAH	10.583.893.110,00	9.474.255.134,00	90,00
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.861.595.910,00	5.518.524.883,00	94,00
	Belanja Pegawai	5.861.595.910,00	5.518.524.883,00	94,00
II	BELANJA LANGSUNG	4.722.297.200,00	3.955.730.251,00	84,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.827.621.900,00	3.110.041.906,00	81,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	892.275.300,00	844.788.345,00	95,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.400.000,00	900.000,00	38%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.583.893.110,00)	(9.474.255.134,00)	90,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.583.893.110,00)	(9.474.255.134,00)	90,00

Dari tabel realisasi diatas Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dengan target Rp. 10.583.893.110,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) realisasi sebesar Rp. 9.474.255.135,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dimana tercapai 90% yang terdiri dari :

- **Belanja Pegawai dari target Rp. 5.861.595.910,00** (Lima Milyar Delapan ratus Enam Puluh Satu Juta Lima ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan ratus Sepuluh Rupiah) realisasinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 diperoleh sebesar Rp. 5.518.524.883,00 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dimana tercapai 94 %.
- **Belanja Barang dan Jasa dari target Rp. 3.827.621.900,00** (Tiga Milyar Delapan ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 diperoleh sebesar Rp. 3.110.041.906,00 (Tiga Milyar Seratus Sepuluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) dimana tercapai 81%.



- **Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Target Rp. 892.275.300,00** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 diperoleh sebesar Rp. 844.788.345,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dimana tercapai 95%.
- **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Target Rp. 2.400.000,00** (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 diperoleh sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dimana tercapai 38%.



BAB V PENJELASAN NERACA

Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2021 dengan Nilai Aset sebesar Rp.714.258.668,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Dua ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam ratus Enam Puluh Delapan rupiah) Kewajiban sebesar Rp.0,- (Nihil) dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 714.258.668,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam ratus Enam Puluh Delapan rupiah).

Rincian atas masing-masing akun di Neraca per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

4.1. ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. ,00 () yang terdiri dari :

4.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 0,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) 0,00
--	---	---

Jumlah kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yaitu dalam bentuk saldo UP (uang persediaan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada **Lampiran 1 (BKU Bendahara Pengeluaran)**

4.1.2. Piutang	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 0,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) 0,00
-----------------------	---	---

4.1.3. Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 0,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) 0,00
---	---	---

4.1.4. Piutang Pemerintah Pusat Lainnya- Dana Penyesuaian	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 0,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) 0,00
--	---	---

**4.1.5. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi**

31-12-2020	31-12-2021
0,00	0,00
(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)

Jumlah piutang transfer pemerintah provinsi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

31-12-2020	31-12-2021
0,00	0,00
(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)

Jumlah bagian lancar tagihan penjualan angsuran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.1.7. Bagian Lancar Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

31-12-2020	31-12-2021
0,00	0,00
(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)

Jumlah bagian lancar Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.1.8. Piutang Lainnya

31-12-2020	31-12-2021
0,00	0,00
(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)

Jumlah piutang lainnya sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.1.9. Persediaan

31-12-2020	31-12-2021
(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
2.907.500,00	7.210.000,00

Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.210.000,00

Rincian Persediaan tersaji pada **Lampiran 4 (Berita Acara Pemeriksaan Barang)**

**4.1.10. Belanja Dibayar Dimuka****31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
0,00**

Jumlah belanja dibayar dimuka terdiri dari jumlah belanja Sewa tempat penyimpanan barang dibayar dimuka sampai tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

4.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.2.1. Investasi Non Permanen - Dana Bergulir

Jumlah investasi non permanen - dana bergulir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.2.2. Investasi Non Permanen Lainnya**31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
0,00**

Jumlah investasi non permanen lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.2.3. Pernyataan Modal Pemerintah Pada Lembaga Keuangan Daerah dan Perusahaan Daerah**31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
0,00**

Merupakan Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda pada Lembaga Keuangan Daerah dan Perusahaan Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.106.655.463,00 (Satu Milyar Seratus Enam Juta Enam ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

**4.3.1. Tanah****31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
0,00**

Merupakan nilai tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

4.3.2. Peralatan dan Mesin**31-12-2020
(Dalam Rupiah)
2.277.823.705,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
3.130.423.350,00**

Merupakan nilai peralatan & mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.277.823.705,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.130.423.350,00 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

4.3.3. Gedung dan Bangunan**31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
0,00**

Merupakan nilai gedung dan bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

4.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
0,00**

Merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

4.3.5. Aset Tetap Lainnya**31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
0,00**

Merupakan nilai aset tetap lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

**4.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan****31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
0,00**

Merupakan nilai aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

4.3.7. Akumulasi Penyusutan**31-12-2020
(Dalam Rupiah)
1.673.242.537,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
2.023.767.887,00**

Merupakan nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.673.242.537,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.023.767.887,00.

4.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset non lancar lainnya yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Nilai Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 97.320.000,00.-

4.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran**31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
0,00**

Tagihan penjualan angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah Kota Samarinda sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.4.2. Tuntutan Ganti Rugi**31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00****31-12-2021
(Dalam Rupiah)
0,00**

Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00



4.4.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 0,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) 0,00
---	---	---

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.4.4. Kas yang dibatasi penggunaan	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 0,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) 0,00
--	---	---

Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.4.5. Aset Tak Berwujud	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 205.925.660,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) 205.925.660,00
---------------------------------	---	---

Jumlah Aset Tak Berwujud merupakan saldo asset tak berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 205.925.660,00

4.4.6. Aset Lain-lain	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 665.846.825,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) 664.004.438,00
------------------------------	---	---

Jumlah Aset Lain-lain ini sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 664.004.438,00

4.5. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Kota Samarinda terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dan Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah kewajiban Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Perempuan Kota Samarinda 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

**4.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK****4.5.1.1. Utang Perhitungan****Pihak Ketiga (PFK)**

Merupakan Utang Perhitungan kepada Pihak Ketiga yang terdiri atas Hutang kepada Pihak Ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.5.1.2. Utang Jangka Pendek

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
00,00	00,00

Merupakan bagian utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00

4.5.1.3. Utang Pegawai

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
00,00	00,00

Merupakan Utang kepada Pegawai yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2021 sebesar Rp. ,00

**4.5.1.4. Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang**

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
0,00	0,00

Merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.5.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**4.5.2.1 Utang Dalam Negeri – Pemerintah
Pusat**

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
0,00	0,00

Merupakan hutang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.



4.5.2.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31-12-2020 (Dalam Rupiah) ,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) ,00
---	--	--

Merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2021 sebesar Rp. ,00

4.6. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya. Nilai Ekuitas Dana Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 714.258.668,00 (Tujuh ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih Kota Samarinda yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih Kota Samarinda yang tertanam dalam dana cadangan.

Rincian Ekuitas Dana dapat dilihat sebagai berikut :

a. Ekuitas Dana Lancar	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 714.258.668,00	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 714.258.668,00
-------------------------------	---	---

Ekuitas Dana Lancar merupakan nilai kekayaan bersih aset lancar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 714.258.668,00 dengan rincian sebagai berikut :

4.6.1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 0,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) 0,00
--	---	---

Saldo ini merupakan saldo Kas yang berada di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UP) sampai tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

**4.6.2. Pendapatan Ditangguhkan****31-12-2020**
(Dalam Rupiah)
0,00**31-12-2021**
(Dalam Rupiah)
0,00

Jumlah ini merupakan saldo kas yang berada di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.6.3. Cadangan Piutang**31-12-2020**
(Dalam Rupiah)
0,00**31-12-2021**
(Dalam Rupiah)
0,00

Cadangan Piutang merupakan kekayaan yang tertanam dalam piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.6.4. Cadangan Persediaan**31-12-2020**
(Dalam Rupiah)
0,00**31-12-2021**
(Dalam Rupiah)
0,00

Jumlah cadangan persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 yang merupakan kekayaan yang tertanam dalam bentuk persediaan berupa :

4.6.5. Cadangan Belanja Dibayar Dimuka**31-12-2020**
(Dalam Rupiah)
0,00**31-12-2021**
(Dalam Rupiah)
0,00

Jumlah cadangan belanja dibayar dimuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.6.6. Dana Yang Harus disediakan**Untuk pembayaran utang Jk.Pendek****31-12-2020**
(Dalam Rupiah)
00,00**31-12-2021**
(Dalam Rupiah)
00,00

Jumlah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah merupakan dana yang harus disediakan untuk pembayaran bagian lancar utang kepada Pihak Ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan utang kepada pegawai yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00

**b. Ekuitas Dana Investasi.**

Jumlah Ekuitas Dana Investasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 saldo ini merupakan kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang tertanam dalam bentuk investasi jangka panjang, investasi aset tetap, dan investasi aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

4.6.7. Diinvestasikan dlm Investasi	31-12-2020	31-12-2021
Jangka Panjang	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
	0,00	0,00

Jumlah ini merupakan kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang tertanam dalam investasi jangka panjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.6.8. Diinvestasikan dlm Aset Tetap

Jumlah ini merupakan kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang tertanam dalam aset tetap. Jumlah kekayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang diinvestasikan dalam aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.106.655.463,00 terdiri dari :

	31-12-2020	31-12-2021
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.277.823.705,00	3.130.423.350,00
Gedung dan Bangunan	0,00	2,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.673.242.537,00)	2.023.767.887,00
	<u>604.581.168,00</u>	<u>1.106.655.463,00</u>



4.6.9. Diinvestasikan dlm Aset lainnya	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 106.770.000,00	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 97.320.000,00
---	---	--

Jumlah ini merupakan kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Samarinda yang tertanam dalam aset lainnya. Jumlah kekayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang diinvestasikan dalam aset lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Rp. 97.320.000,00.

4.6.10. Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Jumlah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

c. Ekuitas Dana Cadangan	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 0,00	31-12-2021 (Dalam Rupiah) 0,00
---------------------------------	---	---

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.6.11. Diinventarisasi Dalam Dana Cadangan	31-12-2020 (Dalam Rupiah) 0,00	31-12-2021 (dalam Rupiah) 0,00
--	---	---

Jumlah ini merupakan Inventaris dalam Dana Cadangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00



BAB VI

PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Samarinda sesuai perubahan adalah target anggaran sebesar Rp. 10.583.893.110,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) target belanja operasi sebesar Rp .9.474.255.134,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

4.7 PENDAPATAN

Tahun Anggaran 2021, target pendapatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebesar Rp 0,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 0,00

4.7.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 0,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 0,00 atau 0 % . Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

4.7.2 Retribusi Daerah

31-12-2020
(Dalam Rupiah)
0,00

31-12-2021
(dalam Rupiah)
0,00



4.7.3 BELANJA

Tahun Anggaran 2021 belanja yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebesar Rp. 10.583.893.110,00, (Sepuluh Milyar Lima ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah direalisasikan sebesar Rp. 9.474.255.134,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau 90 %. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja Tahun 2021 dikelompokkan yaitu : Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung sendiri dibagi lagi menjadi Belanja Pegawai. Serta Belanja Langsung dibagi menjadi Belanja barang dan Jasa, Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya. Atas kelompok belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.7.4 Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai :

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
7.611.613.450,00	5.861.595.910,00

Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2021 yang direncanakan sebesar Rp. 5.861.595.910,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan ratus Sepuluh Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.518.524.883,00 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau 94 % terdiri dari :

4.7.5 Belanja Langsung

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
6.448.892.000,00	4.722.297.200,00

Belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 4.722.297.200,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.955.730.251,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau 84% terdiri dari :



4.7.6 Belanja Barang & Jasa

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
1.162.721.450,00	3.827.621.900,00

Belanja dan Jasa yang merupakan belanja langsung Tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 3.827.621.900,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.110.041.906,00 (Tiga Milyar Seratus Sepuluh Ribu Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) atau 81%.

4.7.7 Belanja modal Peralatan dan Mesin

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
327.804.175,00	894.275.300,00

Belanja modal yang merupakan belanja langsung ini dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 894.675.300,00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 845.688.345,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau 95 %.

4.7.8 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
,00	2.400.000,00

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja langsung ini dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 diperoleh sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dimana tercapai 38%.

**BAB VII****PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menggambarkan posisi Pendapatan-LO dengan Beban per 31 Desember 2021 dengan nilai Pendapatan-LO sebesar Rp. 00,- dan Beban sebesar Rp. 8.977.328.339,00 (Delapan Milyar Sembilan ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sehingga terjadi Defisit-LO sebesar Rp. 8.977.328.339,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) Rincian atas masing-masing Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

4.8.1. Pendapatan - LO

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
0,00	0,00

Pendapatan - LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00. :

4.8.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
0,00	0,00

Merupakan Pendapatan Retribusi Daerah – LO yaitu Retribusi Jasa Umum yang realisasinya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.8.3 Lain-Lain PAD Yang Sah - LO

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
0,00	0,00

Merupakan Lain-lain PAD Yang Sah – LO yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN yang realisasinya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

4.8.1. Beban

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
6.802.308.749,00	8.977.328.339,00



Beban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.977.328.339,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari :

4.8.1.1 Beban Operasi

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
6.802.328.749,00	8.977.328.339,00

Beban Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda terdiri dari Beban Pegawai – LO, Beban Barang dan Jasa serta Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar. Rp. 8.977.328.339,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

4.8.1.2 Beban Pegawai - LO

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
4.747.486.384,00	5.518.524.883,00

Beban Operasi yang merupakan Beban Pegawai – LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.518.524.883,00 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

4.8.1.3 Beban Barang dan Jasa

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
21.000.000,00	58.500.000,00

Beban Operasi yang merupakan Beban Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 58.500.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



4.8.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
9.450.000,00	9.450.000,00

Beban Operasi yang merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 9.450.000,00.

4.8.1.4 Defisit Non Operasional

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
0,00	0,00

Defisit Non Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

4.8.1.5 Defisit dari Kegiatan

Non Operasional Lainnya - LO

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (dalam Rupiah)
0,00	0,00

Defisit Non Operasional yang merupakan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda per 31 Desember 2021 sebesar Rp.00,-



BAB VIII

PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menggambarkan Defisit - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.977.328.339.00 (Delapan Milyar Sembilan ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) ditambah dengan Ekuitas Awal per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 714.258.668,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) ditambah dengan koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.00 sehingga didapat Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.211.185.463.00 (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).



BAB IX
P E N U T U P

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021 ini dibuat, semoga dapat dijadikan sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja anggaran yang baik di waktu yang akan datang.

Samarinda, 31 Januari 2022

Kepala Dinas,

H. FITERMEN,SH,MM
NIP. 19621231 198601 1 206



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun Anggaran 2020 yang terdiri (a) Laporan Realisasi APBD; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Ekuitas; (d) Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, pelaksanaan anggaran dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS,

H. FITERMEN,SH,MM

NIP. 19621231198601 1 206



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kiranya RahmatNya kita telah menyelesaikan Buku Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Keuangan tidak lepas dari Upaya Pemerintah Kota Samarinda mengimplemantasikan di berlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah dijabarkan lebih rinci antara lain dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Kepada Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 ini diucapkan terima kasih.

Akhirnya, upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mempersiapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 dalam Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang lebih transparan masih perlu dilanjutkan kreatifitas internal dan kritik serta saran yang kondusif dari berbagai pihak.

Samarinda, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS,

H. FITERMEN,SH,MM

NIP. 19621231198601 1 206